Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

Penggunaan Surat Keterangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017

Use of Information Letters in Selection of 2017 Pekanbaru City Head Head

Adrian Faridhi

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Diterima: Oktober 2018; Disetujui: Januari 2019; Diterbitkan: Februari 2019

*Corresponding Email: adrian@unilak.ac.id

Abstrak

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan sekali dalam lima tahun termasuk juga dalam hal ini pemilihan kepala daerah (Pilkada), memilih merupakan hak asasi yang mesti dilindungi sebagai hak dasar warga negara. Syarat untuk memilih dalam perkembangannya mengalami perluasan makna demi dapat menggunakan hak politik berupa memilih dan dipilih, pada awalnya syarat memilih menunjukkan surat undangan memilih, dengan putusan Mahkamah Konstitusi cukup menunjukkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), timbul permasalahan ketika proses penerbitan KTP bermasalah, namun penggunaan KTP sebagai dasar identitas untuk memilih, maka terbitlah ketentuan penggunaan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP yang belum selesai. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis yang berlokasi di Kota Pekanbaru. Hasil Penelitian yaitu penggunaan surat keterangan sebagai pengganti KTP didapatkan jumlah yang cukup besar saat Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2017 dan surat keterangan yang digunakan sebagai pengganti KTP diberikan tidak melampirkan foto sebagaimana yang terdapat didalam KTP yang berpotensi menimbulkan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada.

Kata Kunci: KTP, Surat Keterangan, Pilkada.

Abstract

Elections (elections) are democratic parties held once every five years, including in this case regional head elections (Pilkada), voting is a human right that must be protected as a basic right of citizens. The requirement to choose in its development has expanded its meaning in order to use political rights in the form of electing and choosing, initially the requirement to show an invitation letter of choice, with the Constitutional Court's decision to show identity cards (KTP), problems arise when the KTP issuance process is problematic, but the use of KTP as the basis of identity to choose, then the provisions of the use of Certificates are issued as a substitute for the KTP that has not been completed. This research method uses juridical sociological research located in Pekanbaru City. The results of the study, namely the use of a certificate as a substitute for KTP, obtained a considerable amount when the Pekanbaru City Election in 2017 and the certificate used as a substitute for KTP were given not to attach photos as contained in the KTP which could potentially cause fraud in the implementation of the Election.

Keywords: *KTP, Certificate, Election*

How to Cite: Faridhi, A. (2018). Penggunaan Surat Keterangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017, 5 (1) 2018 : 86-93.

PENDAHULUAN

Pesta demokrasi diwujudkan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) dan peraturan perundang-undangan dibawahnya mengatur mengenai Pemilu dan Pilkada. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana berbunyi "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemilu dan Pilkada yang diselenggarakan merupakan perwujudan kehendak ataupun hak rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945. Negara sebagai organ kekuasaan mesti melindungi agar hak rakyat yang merupakan hak asasi tetap dilaksanakan secara adil dan demokratis dapat terlaksana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota menentukan mekanisme pemilihan kepala daerah, bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan Pilkada secara langsung membawa konsekuensi dengan pemanfaatan daftar pemilih tetap (DPT) yang menghimpun seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, sehingga dapat terjamin dalam menggunakan hak politik warga negara dalam Pemilu ataupun Pilkada.

Polemik maupun permasalahan berkaitan DPT setiap penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pilkada menjadi persoalan yang tidak kunjung selesai. Saat dikabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Tahun 1945 berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 sebagai berikut: 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2) Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya; 3) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut: 1) Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; 2) Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; 3) Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; 4) Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya,

terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; 5) Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 menentukan bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan identitas kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi indikator bahwa masih banyak terdapat warga negara yang potensial tidak dapat memilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih, sehingga diperlukan perlakuan khusus agar warga negara masih dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi No. 102/PUU-VII/2009, maka KTP dapat digunakan sebagai bukti untuk dapat memilih dan dimasukkan dalam regulasi pemutahiran data dan daftar pemilih. Besar harapan masyarakat dengan penggunaan KTP dapat meminimalisir data pemilih yang ganda ataupun fiktif, hal ini dikarenakan KTP yang berlaku menggunakan basis data elektronik, satu NIK untuk satu orang, namun problem yang timbul dari penggunaan KTP menjadi permasalahan yang kompleks yang hampir sama dengan daftar pemilih tetap jelang Pemilu ataupun Pilkada.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Masih terdapatnya warga negara yang belum memiliki KTP-el, walaupun sudah melakukan perekaman, dengan berbagai alasan seperti pengadaan blangko yang kurang dan hal teknis lainnya yang belum siap, mengakibatkan banyak warga negara yang tidak memiliki KTP-el, padahal Pemilu ataupun Pilkada menggunakan data perekaman KTP-el yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri.

Adanya Kebijakan menyamakan Pemilih yang memiliki KTP-el dengan Surat Keterangan dalam Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2017 menimbulkan persoalan-persoalan yang mesti dicarikan solusi. Menurut Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016, menentukan bahwa pemilih harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin; b) tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; c) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d) berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; e) dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan f) tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemilu adalah salah satu syarat demokrasi, sebab dengan pemilu dapat dibentuk “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Melalui pemilutersedia ruang bagi setiap warga negara untuk berkompetisi menduduki jabatan pemerintahan secara fair atas pilihan warga negara. Dengan demikian pemilu merupakan mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan agar rakyat berdaulat atas

dirinya sendiri. Karena itu, pemilu menjadi indikator negara demokrasi, sehingga tidak ada satu pun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu (Supriyanto & Wulandari, 2013)

Proses pemilihan kepala daerah juga berkaitan dengan upaya memenangkan kompetisi elektoral secara legal, ekstra-legal maupun ilegal. Namun, pada prakteknya, perubahan peraturan hukum dan sistem pemilihan serta kampanye secara langsung tersebut ternyata juga tidak serta merta membuat pemilu bebas dari manipulasi, korupsi serta penggunaan instrumen kekerasan. (Wulandari, 2015)

Perlindungan terhadap warga negara dalam penggunaan hak politik, diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD Tahun 1945 menentukan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal 28 d Ayat (1) dan Ayat (3) UUD Tahun 1945 menentukan bahwa: "(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"; "(3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Perlindungan inilah yang menjadi dasar terhadap penggunaan hak politik dan termasuk juga dalam penggunaan hak pilih dalam Pemilu dan Pilkada.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yakni dengan lebih memfokuskan terhadap persoalan-persoalan yang muncul dan untuk itu peneliti menitik beratkan pembahasan pada ketentuan perundang-undangan dan melihat bagaimana hukum dipraktikkan dalam masyarakat. Sifat penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research merupakan penelitian langsung ke lapangan.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: KPU Kota Pekanbaru; Panwaslu Kota Pekanbaru; Pengamat Kebijakan dan Pemerintahan.

Dari populasi yang telah teridentifikasi, maka peneliti akan menentukan sampel, penetapan sampel ini menggunakan metode sensus untuk KPU Kota Pekanbaru, Panwaslu Kota Pekanbaru, dan Pengamat Politik dan Demokrasi. Sebagaimana dapat dilihat pada table berikut:

No	Jenis Populasi		Populasi	Sampel	Pre sen tase
1.	KPU Pekanbaru	Kota	5	1	20 %
2.	Panwaslu Pekanbaru	Kota	3	1	33.3 %
3.	Pengamat Politik dan Demokrasi	Politik	1	1	100 %

Sumber data: data olahan 2018

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah dari data primer, data sekunder dan data tertier. Data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti melalui responden atau sampel, data ini dapat berasal dari masyarakat, KPU Kota Pekanbaru, Panwaslu Kota Pekanbaru, dan Pengamat Politik dan Demokrasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok permasalahan yang dibahas. Data sekunder dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah, seminar, brosur, dan lainnya. Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, makalah, dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder.

Untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab persoalan-persoalan yang ada, adalah dengan wawancara. Metode Wawancara ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada responden untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan penggunaan surat keterangan

dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Pekanbaru tahun 2017.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan metode pengumpulan data melalui literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Analisis data yang penulis gunakan adalah mengelompokkan data berdasarkan persoalan yang ada, kemudian dilakukan pengolahan data. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yang kemudian diungkap dalam bahasa dan kalimat secara deskriptif kualitatif, yakni memberikan penjelasan terhadap permasalahan dan penyelesaian permasalahan yang diajukan secara sistematis dan menyeluruh. Adapun teknik penyimpulan data hasil penelitian digunakan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2016

Penelitian ini membahas Surat Keterangan saat penyelenggaraan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, bahwa dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru yang menggunakan Surat Keterangan saat memilih lebih kurang diangka 12.000 (dua belas ribu) pemilih (Wawancara dengan Bapak Yasrif Yakub Tambusai, S.H., M.H. sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kota Pekanbaru.), jumlah ini tergolong cukup besar saat Pilkada. Dan kendala yang dihadapi bahwa jumlah surat suara yang dibatasi dalam sebuah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan kekhawatiran memobilisasi massa dalam memilih calon tertentu.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2017 merupakan pelaksanaan pesta demokrasi serentak yang kedua kalinya di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan KPU yang mengatur tentang berbagai hal termasuk di

dalamnya tentang pemutahiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota.

KPU menyesuaikan peraturannya dengan kebutuhan yang terjadi saat itu, seperti dengan polemik dalam skala nasional seperti terbatasnya jumlah blanko KTP yang terjadi hampir diseluruh wilayah Republik Indonesia. Proyek Nasional pengadaan KTP-el yang menjadi acuan ataupun syarat untuk ikut sebagai pemilih pada Pilkada maupun Pemilu serentak 2019. Namun, pengadaan KTP-el timbul masalah dan menghambat kelancaran dalam pemutahiran data pemilih, sehingga penerbitan Surat Keterangan (Suket) menjadi langkah penyelesaian terhadap data pemilih yang belum memiliki KTP-el.

Keberadaan Suket dalam konteks Pilkada merupakan perkembangan dari dibolehkannya KTP sebagai bukti untuk dapat memilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 menentukan bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan identitas kependudukan (KTP, KK, Paspor).

Pada saat KTP dapat digunakan untuk memilih dalam pemilihan kepala daerah/ pemilihan umum, Pemerintah hanya menerbitkan KTP-el yang menggunakan teknologi perekaman identitas warga negara, serta memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal yang tidak bisa dipalsukan ataupun digandakan, dan dalam proses penerbitannya menjadi masalah yang kompleks, sehingga penerbitan KTP biru (lama) tidak diterbitkan lagi, dan hanya menjadikan KTP-el sebagai tanda pengenal yang sah.

KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutahiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Grafik Alur dan syarat memilih

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 30, menyebutkan bahwa Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan. Sedangkan Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan menurut Pasal 1 Angka 17 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016.

Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017. Isu yang selalu menjadi permasalahan dan perhatian publik dalam setiap penyelenggaraan Pilkada, berupa data pemilih tetap (DPT) yang ganda ataupun warga negara yang tidak terdaftar sebagai pemilih.

Negara Republik Indonesia memberikan aturan syarat bagi warga negara untuk dikategorikan bisa menjadi pemilih. Ketentuan bagi Warga Negara untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pilkada ataupun Pemilu, yaitu Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (1). Ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan KPU Pasal 4 Ayat (2) huruf a sampai f, menjelaskan syarat-syarat Pemilih sebagai berikut: a)

genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin; b) tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; c) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d) berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; e) dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan e) tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada saat tahapan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dimulai, KPU bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan verifikasi data pemilih (Wawancara dengan Bapak Amiruddin Sijaya, S.Pd.,M.M. sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru), sebagaimana diatur dalam Pasal 13 A, sebagai berikut: 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat berdasarkan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1a); 2) Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU/ KIP Kabupaten/ Kota menemui dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta menerbitkan keterangan tersebut; 3) Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di kabupaten/kota setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang

sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di kabupaten/kota setempat dan disaksikan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

Selain permasalahan dalam penerbitan KTP-el yang menjadi permasalahan nasional, ekses negatif berpotensi timbul di kawasan yang rentan dan dapat menimbulkan konflik yaitu daerah perbatasan dengan kabupaten tetangga, serta terdapatnya masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Pekanbaru (Wawancara dengan Bapak Yasrif Yakub Tambusai, S.H., M.H. sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kota Pekanbaru), namun tidak memiliki KTP Pekanbaru, termasuk juga pendatang baru yang menetap.

KPU Kota Pekanbaru melaksanakan fungsinya dengan berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2016, untuk membersihkan data-data pemilih yang memiliki tempat tinggal ganda (lebih dari satu), jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. Hal ini tidak tertutup kemungkinan terpantau semua oleh KPU dengan begitu luasnya wilayah Kota Pekanbaru.

Masyarakat yang sampai saat pemilihan belum memiliki KTP-el, maka diberi kesempatan memilih dengan dasar Surat Keterangan dari dinas terkait, pengakomodiran ini dicantumkan dalam formulir Model A.KWK, sebagai diatur dalam Pasal 10 Ayat 6 a dan 6 b, sebagai berikut: a) belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau b) tidak dapat ditemui secara langsung

oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; c) Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.

Pasal 10 Ayat 6 b: PPDP mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) pada formulir Model A.KWK, dengan memberikan keterangan: a) tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau b) belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

Pada saat pelaksanaan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017, pemilih yang tidak memiliki KTP dan hanya menggunakan Surat Keterangan, menggunakan formulir Model A.C-KWK yang dikerjakan oleh PPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (3), sebagai berikut "PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6b), dengan menggunakan formulir Model A.C-KWK".

Masyarakat yang belum memiliki KTP-el dan hanya memiliki Surat Keterangan, dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih saat pencocokan dan penelitian (Coklit), sebagaimana diatur dalam Pasal 37, sebagai berikut: 1) Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan. 2) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih dapat menunjukkan Kartu Keluarga sebagai dasar Coklit. 3) KPU/ KIP Kabupaten/ Kota bersama PPK dan PPS setempat mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan

memberikan keterangan tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

Penggunaan Surat Keterangan dalam Pilkada ataupun Pemilu hanya dapat digunakan sebelum akhir tahun 2018, sebab pada saat pemilu 2019, semua pemilih sudah terdaftar dan berdasarkan data dari perekaman KTP-el.

Ketentuan yang membatasi pemberlakuan Surat Keterangan diatur dalam Pasal 41 A Ayat (1) dan Ayat (2), sebagai berikut: 1) Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pemilih dapat memilih dengan menggunakan Surat Keterangan paling lambat bulan Desember 2018; 2) Terhitung sejak bulan Januari 2019, syarat terdaftar sebagai Pemilih hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Kendala dalam Pelaksanaan Surat Keterangan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 secara umum berjalan lancar, namun dari beberapa temuan dilapangan yang mesti dicarikan solusi oleh pembuat kebijakan yaitu pemerintah.

Penggunaan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el sangat rentan dengan penyalahgunaan, untuk diketahui, surat keterangan hanya diberikan kepada warga yang telah merekam data KTP-el, namun tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT).

Petugas yang melakukan coklit akan dibuat bekerja ekstra disebabkan masih banyak warga masyarakat yang belum punya KTP-el namun sudah punya hak untuk memilih. Persoalan timbul bahwa terdapat warga yang tidak bisa terpenuhi hak pilihnya karena mereka tidak terdaftar di DPT tapi punya alat bukti KTP yang harus dilindungi oleh negara. Kendala yang

didapatkan antara lain, saat rekap pemilih yang akan menggunakan suket (surat keterangan) di TPS yang sangat rentan dipermasalahan.

Penggunaan surat keterangan tidak urat sebagai pengganti KTP, hal ini terlihat dari tidak adanya foto yang bersangkutan (Wawancara dengan pengamat Pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Bapak Birman Simamora, S.H., M.H.), ini bisa memicu untuk disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

SIMPULAN

Penggunaan surat keterangan dalam Pilkada Kota Pekanbaru cukup besar dan rentan akan terjadinya penyalahgunaan, serta menjadi tugas pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan KTP Elektronik. Kendala yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pilkada terkait dengan penggunaan surat keterangan berupa cukup besarnya penggunaan surat keterangan hingga 12.000 (dua belas ribu) pemilih dan rentan manipulasi penggunaan surat keterangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Supriyanto, D. & Wulandari, L. (2013). *Basa Basa Dana Kampanye*, Jakarta; Yayasan Perludem.
- Jurnal Pemilu dan Demokrasi, *Memperkuat Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih*, Jakarta: Yayasan Perludem, 2012.
- Faridhi, A. (2017). Penguji Peraturan Perundang-undangan Tunggal Keniscayaan. *JURNAL MERCATORIA*, 10(2), 180-196.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009.
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.